

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, Oktober 2024, P. 705-715
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13911053)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13911053>

Upaya Pemerintah Dalam Menekan Tingginya Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Sabina Putri Amelia¹, Alisha Reva Widiastiwi², Garneta Rizka Camilla³, Rezky Fabyo Darussalam⁴, Nur Farah Afifah⁵

¹²³⁴⁵Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611103@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611107@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611110@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611120@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210412185@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstrak

Jumlah pengangguran dan kemiskinan yang tinggi telah menjadi masalah besar yang dihadapi oleh pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di negara serta stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, pemerintah memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta mengevaluasi seberapa efektif kebijakan tersebut. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasional adalah salah satu upaya yang dilakukan dari beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Selain itu, pemerintah mendorong investasi dalam bidang strategis yang memiliki kapasitas untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti sektor manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital. Selain itu, untuk membantu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, kebijakan subsidi dan bantuan sosial juga diterapkan. Sebaliknya, untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, salah satu pendekatan penting adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan dalam menerapkan kebijakan ini, termasuk birokrasi yang kompleks, ketimpangan distribusi sumber daya, dan kurangnya akses modal. Namun, dengan upaya yang konsisten dan terarah, pemerintah diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Pengangguran, Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah

Abstract

The high rates of unemployment and poverty have become significant issues faced by governments in many countries, including Indonesia. These phenomena affect the country's economic growth as well as social stability and the well-being of affected communities. Through various policies and initiatives, the government plays a crucial role in reducing the high levels of unemployment and poverty. This research aims to examine what the government is doing to reduce poverty and unemployment rates and to evaluate the effectiveness of these policies. One of the government's key efforts is improving the quality of human resources (HR) through education and vocational training programs. Additionally, the government encourages investment in strategic sectors with the capacity to create new jobs, such as manufacturing, tourism, and the digital economy. Moreover, to assist those living below the poverty line, subsidy policies, and social assistance programs are implemented. On the other hand, to promote economic independence within communities, one important approach is the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Nevertheless, the government still needs to overcome several significant challenges in implementing these policies, including complex bureaucracy, inequality in resource distribution, and limited access to capital. However, with consistent and well-directed efforts, the government is expected to reduce poverty and unemployment rates in the long term significantly.

Keywords: Unemployment, Poverty, Government Policy

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 05 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Tingginya pengangguran dan kemiskinan menjadi permasalahan serius di banyak negara, terutama negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada kondisi perekonomian seperti rendahnya pertumbuhan dan rendahnya produktivitas, namun juga berdampak pada stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan. Pengangguran di

Indonesia tinggi karena berbagai alasan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang cepat, rendahnya kualitas pendidikan, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi cenderung terfokus pada perkotaan, menyebabkan daerah pedesaan dan daerah tertinggal mempunyai lebih sedikit lapangan kerja. Ketika terjadi kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, maka tingkat pengangguran di daerah tersebut tinggi. Kecepatan pertumbuhan penduduk juga menjadi salah satu faktor, seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah pencari kerja baru semakin meningkat setiap tahunnya, namun lapangan kerja tidak semakin bertambah. Lalu dengan masih adanya kesenjangan pendidikan, banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal ini terlihat dari informasi Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam websitenya pada bagian subjek tenaga kerja, terdapat data Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015 -2023. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2024 mencapai 5,45%. Ini berarti ada sekitar 7,4 juta orang yang menganggur dari total angkatan kerja.¹

Selain faktor-faktor tersebut, masih banyak variabel lain yang berperan sehingga menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional untuk mengatasinya. Melihat permasalahan ini, pemerintah mempunyai peran penting dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Seperti salah satu poin SDG nomor 1, bertujuan mengakhiri kemiskinan, dan nomor 8, yang berfokus pada upaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Di Indonesia, prinsip - prinsip SDG 1 dan 8 menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi tantangan pengangguran dan kemiskinan.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan (SDG), terutama dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pendekatan Teori Partisipatif dalam Komunikasi Pembangunan sangat relevan. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat di berbagai tingkat membantu implementasi kebijakan tidak hanya dari atas ke bawah, namun juga sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Sejalan dengan prinsip SDG yang fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam merancang solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sangat krusial untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Indonesia telah mempersiapkan langkah-langkah penting dalam melaksanakan TPB/SDGs dengan melibatkan empat platform yang mengedepankan prinsip inklusivitas, yaitu: Platform Pemerintah dan Parlemen, Platform Akademisi dan Pakar, Platform Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Platform Organisasi Masyarakat Sipil dan Media. Menteri Bambang berharap agar partisipasi dari keempat platform ini dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan SDGs. Ia menyoroti peran penting Platform Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dalam menyebarkan informasi serta mengadvokasi SDGs, membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta memfasilitasi program dan pelaksanaannya, termasuk monitoring dan evaluasi.²

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah merespons tantangan tingginya pengangguran melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan peluang yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Beberapa program, seperti Kartu Prakerja, program bantuan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia yang juga memberikan dana pelatihan hingga Rp1.000.000 untuk mengikuti pelatihan dari berbagai lembaga pelatihan yang terkurasi³, dan program Padat Karya Tunai, yaitu pemberdayaan masyarakat pedesaan yang efektif, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan prioritas pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan tambahan pendapatan/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan

¹ Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2021-2023. Diakses pada 23 September 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>

² Bappenas. (2016). *Peran Masyarakat Sipil Untuk Kesuksesan TPB/SDGs*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/peran-masyarakat-sipil-untuk-kesuksesan-tpbsdgs>

³ Prakerja. (2022). *Kartu Prakerja Jadi Best Practice dan Pilot Project Program Nasional Lainnya*. Diakses dari <https://www.prakerja.go.id/artikel/insight/kartu-prakerja-jadi-best-practice-dan-pilot-project-program-nasional-lainnya>

mendukung tingkat pertumbuhan yang rendah.⁴ Program - program tersebut diluncurkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mendorong sektor-sektor ekonomi yang potensial. Selain program-program tersebut, pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam memastikan keberhasilan kebijakan-kebijakan ini.

Berdasarkan teori partisipatif, melalui komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, program-program pembangunan dapat menjadi lebih relevan, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini, kami akan membahas mengenai bagaimana pemerintah Indonesia berupaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta meninjau terkait efektifitas dari program-program yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, yang merupakan metode penelitian untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis penelitian terdahulu terkait topik yang dibahas. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan penelitian, dan hasil-hasil yang telah tercapai dalam studi terkait kebijakan pemerintah terhadap pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder yang relevan dengan topik artikel yang kami tulis, yang didalamnya berisi Jurnal akademik, artikel-artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal yang berkaitan dengan ekonomi, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Buku-buku teks, Literatur dari buku-buku yang membahas kebijakan pemerintah, pengangguran, dan kemiskinan. Laporan lembaga internasional dan nasional Misalnya, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, dan United Nations Development Programme (UNDP). Disertasi atau tesis penelitian mahasiswa atau peneliti tentang program pemerintah dan isu pengangguran serta kemiskinan. Laporan kebijakan pemerintah, Data dari program pemerintah, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), serta kebijakan terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja.

TINJAUAN TEORI

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Teori Partisipasi. Dalam teori ini keterlibatan masyarakat sangat berperan penting dalam proses pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat menekankan bahwa solusi untuk masalah sosial, termasuk pengangguran dan kemiskinan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Peran dalam partisipasi komunikasi masyarakat ini pun tidak terlepas dari kehadiran para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat sebagai warga setempat yang berisi ide-ide ataupun program pembangunan dan peran komunikasi pembangunan, yaitu masyarakat luas, baik penduduk desa atau kota yang menjadi sasaran pembangunan.⁵

Adanya keterlibatan masyarakat memberikan kesempatan juga kepada masyarakat miskin dan penganggur untuk terlibat dalam dialog, teori ini mendorong pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, seperti peningkatan keterampilan kerja, akses terhadap pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan. Keterlibatan masyarakat membentuk sebuah komunikasi yang sangat berperan penting dalam mendukung proses partisipatif ini. Melalui media lokal, diskusi komunitas, dan program konsultasi publik, masyarakat yang terdampak pengangguran dan kemiskinan dapat menyuarakan kebutuhan, aspirasi, serta gagasan mereka mengenai solusi terbaik. Media berbasis komunitas atau saluran komunikasi yang interaktif memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Dalam konteks pengangguran, komunikasi partisipatif dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai peluang kerja, pelatihan keterampilan, dan dukungan kewirausahaan, sementara untuk kemiskinan, komunikasi dapat memperkuat jaringan solidaritas lokal dan akses terhadap bantuan ekonomi.

⁴ Kemenkeu. (n.d). *Apakah yang Dimaksud dengan Skema Padat Karya Tunai*. Diakses pada 24 September 2024 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-skema-padat-karya-tunai-2>

⁵ Aw, Sunarto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.

Menurut Thomas (dalam Hadiyanto, 2008:81)⁶, komunikasi partisipatif berkaitan dengan akses masyarakat terhadap proses pembangunan dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang dipengaruhi oleh teori Paulo Freire. Freire menegaskan bahwa hak untuk menyuarakan pendapat, baik secara individu maupun kolektif, adalah milik semua orang, bukan hanya segelintir individu. Partisipasi masyarakat dalam komunikasi sangat penting untuk kesuksesan setiap proyek pembangunan, yang didasarkan pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun dan mengelola diri mereka sendiri.

Bessete juga menekankan bahwa komunikasi partisipatif dalam pembangunan melibatkan proses partisipasi masyarakat, termasuk melalui penggunaan media dan komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan dialog antara pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat diidentifikasi masalah yang menjadi fokus pembangunan dan disertai solusi yang konstruktif. Dari perspektif ilmu komunikasi, paradigma baru ini bertujuan untuk membangun kerjasama aktif antara elemen-elemen utama komunikasi, yaitu pemerintah dan masyarakat sebagai pengirim dan penerima pesan, media sebagai sarana komunikasi, serta ide atau program sebagai pesan yang disampaikan.⁷

Dengan memfasilitasi keterlibatan masyarakat, teori Partisipasi memberikan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang lebih nyata. Misalnya, program pemberdayaan komunitas yang berfokus pada pelatihan kerja berbasis kebutuhan lokal atau proyek kewirausahaan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Menekan Tingginya Angka Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia

Menurut Sadono Sukirno⁸, pengangguran adalah seseorang yang secara aktif mencari pekerjaan (berada dalam angkatan kerja) pada tingkat upah tertentu tetapi tidak mampu mendapatkan posisi yang diinginkannya. Selanjutnya, kemiskinan sendiri merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan oleh langkanya alat pemenuh kebutuhan dasar, atau akses yang sulit terhadap pendidikan dan pekerjaan. Baik pengangguran dan kemiskinan merupakan dua tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi, sehingga menjadi fokus utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).⁹ Ketika tingkat pengangguran tinggi, masyarakat kehilangan sumber pendapatan utama, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga bisa menjadi penyebab pengangguran, karena akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja seringkali terbatas bagi kelompok masyarakat yang miskin.

Hal ini selaras dengan tujuan SDGs nomor 1, yaitu mengakhiri kemiskinan, dan tujuan nomor 8, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif serta lapangan kerja yang layak bagi semua. Pendekatan ini juga melibatkan peran penting komunikasi pembangunan, yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kesadaran terhadap program-program yang dilaksanakan. Pengangguran yang tinggi tentunya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemiskinan, oleh karena itu, kebijakan yang menciptakan lapangan kerja berkualitas menjadi prioritas dan berbagai kebijakan serta program yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai upaya yang dilakukan ini melibatkan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial untuk menciptakan dampak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan pemberlakuan berbagai program, seperti pengembangan pendidikan vokasional, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan akses terhadap infrastruktur ekonomi. Dengan mengatasi masalah ini, Indonesia tentu dapat mempercepat pencapaian SDGs karena masyarakat yang bekerja

⁶ Nurul Fadzar Sukarni. "PERAN KOMUNIKASI PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMPERKENALKAN KAMPUNG INGGRIIS DI DESA PARE KEDIRI JAWA TIMUR." *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1(2), 289-301. 2018.

⁷ Winda Kustiawan, Nur Azmi Azizah, Husnia Amro Br Sinaga, dkk. "Konsep Komunikasi Partisipatif dalam Komunikasi Pembangunan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4082-4086. 2023.

⁸ Sadono Sukirno. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

⁹ SDGs adalah komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. <<https://sdgs.bappenas.go.id/>> accessed 3 Oktober 2024

secara produktif lebih mungkin keluar dari kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Terkait dengan komunikasi pembangunan tentunya berperan penting dalam menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program ini. Dalam era digital, pemerintah memanfaatkan media sosial dan kampanye publik untuk menginformasikan kebijakan terkait pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Salah satu contohnya adalah melalui promosi program Kartu Prakerja, yang memberikan pelatihan dan insentif kepada masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Melalui komunikasi yang efektif, program ini berhasil menjangkau jutaan masyarakat Indonesia yang membutuhkan keterampilan tambahan untuk memasuki dunia kerja.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945¹⁰ bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maka tentu saja sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :

1. Upaya pemerintah dalam memperluas pembangunan infrastruktur juga berhubungan erat dengan pencapaian tujuan SDGs. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek, tetapi juga memperbaiki akses masyarakat ke layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar ekonomi. Hal ini dapat didorong dengan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi publik juga tentu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Dalam upaya ini, komunikasi pembangunan memainkan peran penting dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari pembangunan ini dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan juga mendukung mobilitas tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas ekonomi.
2. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga menjadi salah satu pilar utama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pemerintah memberikan berbagai dukungan berupa bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Dapat juga dengan meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan kepada UMKM merupakan salah satu cara untuk berkontribusi dalam upaya ini. Tujuan utamanya adalah agar UMKM dapat terus berkembang di masa depan dan mampu mendukung program dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.¹¹ Dalam konteks komunikasi pembangunan, penting bagi pemerintah untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperkenalkan melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap bantuan ini.
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi salah satu langkah penting dalam menekan pengangguran. Pemerintah menyadari bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan kebutuhan industri menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha untuk menyediakan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang siap pakai dan dapat terserap oleh industri dengan lebih cepat. Kebijakan ini terkait langsung dengan tujuan SDGs nomor 4, yaitu memberikan pendidikan berkualitas bagi semua.
4. Tak hanya fokus pada peningkatan keterampilan, kebijakan perlindungan sosial yang menasar masyarakat miskin juga menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah contoh bagaimana pemerintah berupaya membantu masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui skema ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengembangan diri, misalnya dalam hal pendidikan dan peningkatan kualitas hidup. Melalui komunikasi pembangunan, pemerintah memastikan bahwa informasi tentang program-

¹⁰Yulna Dewita Hia. "Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran." *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education* 1.2 (2015): 208-213.

¹¹Krisnawati, Krisnawati. "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Sosio Informa* 2.2 (2016).

program ini dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, kesenjangan informasi dapat diminimalkan, dan masyarakat yang berhak dapat mengakses bantuan dengan lebih mudah. Program perlindungan sosial ini dilengkapi dengan program kartu prakerja, yang selain bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, juga memberikan insentif kepada pencari kerja selama proses pelatihan. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan sementara bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.

5. Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga menjadi prioritas pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan ekonomi hijau tentunya fokus mendukung pencapaian SDGs, terutama tujuan nomor 13 tentang aksi iklim. Melalui kebijakan ekonomi hijau, pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian organik. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Komunikasi pembangunan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ekonomi hijau dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
6. Pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar generasi muda Indonesia lebih siap bersaing di pasar kerja global. Melalui kebijakan zonasi pendidikan dan berbagai beasiswa, pemerintah berupaya memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Pendidikan yang baik diharapkan menjadi fondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Komunikasi pembangunan di bidang ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tentang program beasiswa, pelatihan, dan peluang kerja dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.
7. Seiring dengan pengembangan teknologi digital, pemerintah juga melihat sektor ekonomi digital sebagai salah satu kunci untuk menciptakan lapangan kerja baru. Industri kreatif yang mencakup sektor seperti film, musik, fashion, dan teknologi digital, dinilai memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja muda. Ditambah lagi dengan perkembangan e-commerce, startup, dan industri teknologi informasi juga turut memberikan peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk terlibat dalam ekonomi digital. Pemerintah mendukung pertumbuhan industri ini dengan berbagai kebijakan insentif dan penyediaan infrastruktur digital, seperti pembangunan jaringan internet di seluruh pelosok negeri. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih fleksibel. Melalui komunikasi pembangunan, pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ini, sekaligus memberikan pelatihan digitalisasi kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat bersaing di era digital.
8. Kebijakan investasi pemerintah juga diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Dengan membuka pintu investasi yang lebih luas, pemerintah berupaya menarik investor asing dan domestik melalui deregulasi serta penyederhanaan izin usaha untuk membangun industri-industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, khususnya di sektor-sektor yang strategis. Komunikasi pembangunan digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dari kebijakan ini, serta bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang kerja yang tercipta.
9. Selain itu, upaya revitalisasi pertanian juga terus digalakkan pemerintah. Sebagai negara agraris, sektor pertanian masih menjadi penopang hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Dengan modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi dan peningkatan akses pasar bagi petani, diharapkan sektor ini dapat lebih produktif dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di pedesaan. Komunikasi pembangunan di sektor

ini berfokus pada penyuluhan dan pendampingan kepada petani, sehingga mereka dapat mengadopsi teknologi pertanian modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

10. Di sektor pariwisata, pemerintah mendorong pertumbuhan destinasi wisata baru untuk menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah. Program "10 Bali Baru" menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di luar Pulau Bali. Pengembangan ini diharapkan tidak hanya membuka peluang kerja di sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga pada sektor-sektor pendukung seperti transportasi, perhotelan, dan ekonomi kreatif lokal. Komunikasi pembangunan di sektor pariwisata ini berperan dalam mempromosikan destinasi-destinasi wisata baru, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan ekonomi pariwisata.
11. Dalam jangka panjang, pemerintah juga berupaya menciptakan iklim usaha yang stabil dan kondusif melalui perbaikan regulasi tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, serta memberikan perlindungan lebih kepada pekerja informal. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan industri dan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Komunikasi pembangunan diperlukan untuk menjelaskan manfaat dan perlindungan yang terkandung dalam regulasi ini kepada masyarakat luas, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi dalam dunia kerja formal.

Banyak upaya pemerintah yang matang dan berhasil memperkuat ketahanan perekonomian nasional bahkan di tengah stagnasi ekonomi global. Tingkat kemiskinan semakin menurun pada bulan Maret 2024, yaitu sebesar 9,03 persen dibandingkan dengan 9,36 persen pada bulan Maret 2023. Dari segi geografi, kemiskinan tampaknya mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah metropolitan, angka kemiskinan menurun dari 7,29 persen pada Maret 2023 menjadi 7,09 persen. Sementara itu, proporsi penduduk miskin di pedesaan turun dari 12,22 persen pada Maret 2023 menjadi 11,79 persen. Di seluruh Indonesia, terjadi penurunan kemiskinan, dengan penurunan terbesar di Bali dan Nusa Tenggara.¹²

Efektivitas Program Pemerintah untuk Menekan Tingginya Angka Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), Khususnya tujuan no 8, yang berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sekaligus memastikan lapangan kerja yang layak bagi semua orang. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan Agenda 2030, kesepakatan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada hak asasi manusia dan kesetaraan, yang bertujuan untuk mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) didasarkan pada prinsip-prinsip universal, terpadu, dan inklusif untuk menjamin bahwa tidak seorang pun terpinggirkan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengurangi pengangguran dengan melaksanakan berbagai program, yang efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran masih belum pasti. Efektivitas merupakan komponen mendasar dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam suatu organisasi, yang mencakup tindakan dan program. Efektivitas dapat dianggap efektif jika tujuan tertentu tercapai. Efektivitas adalah kondisi untuk mencapai tujuan yang diantisipasi dan diinginkan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Efektivitas organisasi biasanya diakui sebagai aspek terpenting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Keberhasilan diukur dengan pencapaian tujuan organisasi.

¹² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun" <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-indonesia-menurun>> accessed 3 Oktober 2024



Berdasarkan data badan pusat statistik di Indonesia pada tahun 2024 Tingkat pengangguran (TPT) Pada bulan february 2024 telah turun menjadi 4,82 persen dibandingkan pada Februari tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 Persen. Penurunan tingkat pengangguran juga sejalan dengan peningkatan angkatan kerja, berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada february tahun 2024 sebanyak 149,38 Juta orang naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,50 persen poin dibanding Februari 2023.



Data yang terdapat pada badan statistik juga memaparkan bahwa tingkat pengangguran yang pada awalnya meningkat pada tahun 2020 dikarenakan covid-19 sudah mulai menurun di awal tahun 2024. Pengangguran di Indonesia berkurang jumlahnya sebesar 790 ribu orang yaitu hampir 7,2 Juta pada Februari 2024. Data pengangguran yang menurun menunjukkan bahwa program yang dibuat pemerintah sudah berhasil untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri, 2022), menunjukkan bahwa salah satu akibat penurunan angka pengangguran di Aceh yaitu karena adanya Program Kartu Prakerja.¹³

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Nely, dkk) bahwa UMKM dapat menyediakan lapangan kerja yang tinggi dan kesempatan kerja baru. Sehingga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Banten¹⁴ Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra, 2023) mengemukakan hasil program padat karya sangat efektif namun kurang efisien dalam mengurangi

¹³ Fitri, I. (2022). Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

¹⁴ Hartika, N., Jumiati, I. E., Damarwulan, L. M., Sudrajat, A., Widyawati, W., & Rudiansyah, R. (2023). Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 42-53.

jumlah pengangguran di Indonesia. Dikatakan kurang efisien dikarenakan program padat karya mengeluarkan biaya yang cukup besar.¹⁵ Dalam hal upaya untuk menurunkan angka pengangguran, pemerintah mempunyai target capaian yaitu diangka 4,5% hingga 5,0% di tahun 2025. Akan tetapi, pada tahun 2024 awal Tingkat Pengangguran Terbuka sudah mencapai di angka 4,82 persen. Artinya pemerintah sebenarnya sudah memenuhi target minimal penurunan angka pengangguran yaitu 5 persen. Namun presentase ini masih sangat kecil, sehingga pemerintah tetap harus mengupayakan untuk menurunkan presentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pemerintah dapat mengevaluasi seluruh program untuk mengurangi angka pengangguran agar presentase penurunan angka pengangguran dapat lebih tinggi dan lebih maksimal. Selain itu pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara masif terkait program-program yang telah dibuat guna menjangkau berbagai aspek lapisan masyarakat. Selain itu menurut teori partisipatif masyarakat juga harus aktif untuk berpartisipasi dalam setiap program yang pemerintah buat agar program dapat berjalan efektif dan mengurangi angka pengangguran. Pemerintah juga dapat membuat sebuah program berkelanjutan Job Fair sebagai media penyambung hubungan antara pengusaha dan pencari kerja. Job Fair memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan perusahaan dan mengikuti proses seleksi yang dilakukan di tempat. Job Fair mencakup berbagai sektor industri, sehingga semua jenis pekerjaan dapat terwakili. Hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pencari kerja dengan beragam latar belakang dan keterampilan. Kedua, penting untuk meningkatkan promosi dan informasi mengenai Job Fair, baik kepada pengusaha maupun pencari kerja potensial. Dengan demikian, jumlah peserta yang hadir dapat meningkat, sehingga meningkatkan peluang penempatan kerja

Upaya pemerintah dalam menekan pengangguran dan kemiskinan memang tidak mudah dan membutuhkan waktu, namun dengan sinergi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan, diharapkan tantangan ini dapat diatasi secara bertahap. Kesuksesan berbagai program ini tidak hanya bergantung pada implementasi di lapangan, tetapi juga pada partisipasi aktif dari masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam keseluruhan upaya ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif. Tujuannya bukan hanya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu sama lain. Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi negara. Kesimpulannya, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi, menjadi tantangan besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tingginya angka pengangguran menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan, sehingga memicu peningkatan kemiskinan, sementara kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang dapat memperburuk masalah pengangguran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program seperti Kartu Prakerja, pemberdayaan UMKM, pengembangan infrastruktur, pendidikan vokasional, serta kebijakan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Semua upaya ini bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, meringankan kemiskinan, dan memperkuat ekonomi secara berkelanjutan. Komunikasi pembangunan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dan dapat mengakses program-program tersebut, baik melalui media tradisional maupun digital. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi digital juga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Hasilnya, upaya ini telah menunjukkan perkembangan positif, dengan penurunan angka kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan pada 2024, memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

¹⁵ SJ, C. J. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Masa Pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 51-62.

Dan dapat kita lihat bersama bahwa terkait dengan efektivitas upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang positif, seperti terlihat dari data penurunan tingkat pengangguran pada awal tahun 2024. Berbagai program pemerintah, seperti Kartu Prakerja, pemberdayaan UMKM, dan program padat karya, telah berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Meski program-program tersebut efektif, beberapa di antaranya seperti program padat karya dinilai kurang efisien karena biaya yang besar. Pemerintah perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki program-program ini agar lebih efisien dan berdampak luas, termasuk dengan meningkatkan sosialisasi dan promosi program seperti Job Fair untuk menjangkau lebih banyak pencari kerja. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program-program ini sangat penting agar tujuan pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran secara berkelanjutan dapat tercapai. Tantangan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia memang kompleks dan memerlukan sinergi kebijakan di berbagai sektor, namun dengan komitmen yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

SARAN

Dalam menghadapi tantangan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah yang terintegrasi, termasuk program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pendidikan vokasional, dan program perlindungan sosial. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar sektor dalam implementasi kebijakan, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, program pelatihan kerja harus terhubung dengan kebutuhan industri agar lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja. Kedua, pentingnya memperluas dan mempermudah akses terhadap informasi terkait program-program yang ditawarkan, terutama di daerah terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara lebih maksimal, pemerintah bisa menjangkau masyarakat yang selama ini mungkin terlewat dari akses informasi tentang program bantuan, pelatihan, atau kesempatan kerja. Selain itu, evaluasi rutin terhadap program yang berjalan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan menemukan solusi yang lebih baik. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam program pemerintah harus ditingkatkan. Hal ini bisa dicapai dengan memberikan edukasi yang lebih baik mengenai manfaat dan prosedur partisipasi, sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Pengembangan inisiatif seperti Job Fair yang lebih masif dan berkelanjutan juga dapat memberikan jembatan antara pengusaha dan pencari kerja, memperluas peluang kerja yang tersedia, dan mempercepat penurunan angka pengangguran di Indonesia.

REFERENSI

- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Aw, Sunarto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- JURNAL
- Hia, Y. D. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education*, 1(2), 208-213.
- Krisnawati, K. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Sosio Informa*, 2(2).
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. A. S. (2019). The Analysis Of The Effects Of Human Development Index And Opened Unemployment Levels To The Poverty In Indonesia. *Jurnal ecoplan*, 2(2), 77-89.
- Ulita, A. S., & Wati, C. H. S. (2024). Sustainability Development Goals (SDGs): Kemiskinan Dan Kelaparan. *Musamus Accounting Journal*, 6(2), 49-54.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.

- Kustiawan, W., Fauzizah, N. A., Sinaga, H. A. B., Oktavia, I., Hafizah, F., Shaliha, F., & Habib, F. (2023). Konsep Komunikasi Partisipatif dalam Komunikasi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4082-4086.
- Sukarni, N. F. (2018). PERAN KOMUNIKASI PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMPERKENALKAN KAMPUNG INGGRIS DI DESA PARE, KEDIRI JAWA TIMUR. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1(2), 289-301.
- Fitri, I. (2022). Penanggulangan Pengangguran melalui Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
- SJ, C. J. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Masa Pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 51-62.
- Hartika, N., Jumiati, I. E., Damarwulan, L. M., Sudrajat, A., Widyawati, W., & Rudiansyah, R. (2023). Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 42-53.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2021-2023. Diakses pada 23 September 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>
- Bappenas. (2016). Peran Masyarakat Sipil Untuk Kesuksesan TPB/SDGS. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/peran-masyarakat-sipil-untuk-kesuksesan-tpbsdgs>
- Kemenkeu. (n.d). Apakah yang Dimaksud dengan Skema Padat Karya Tunai. Diakses pada 24 September 2024 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-skema-padat-karya-tunai-2>
- Prakerja. (2022). Kartu Prakerja Jadi Best Practice dan Pilot Project Program Nasional Lainnya. Diakses dari <https://www.prakerja.go.id/artikel/insight/kartu-prakerja-jadi-best-practice-dan-pilot-project-program-nasional-lainnya>